

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis energi yang melanda Uni Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi titik balik fundamental dalam kebijakan energi Kawasan tersebut. Selama lebih dari lima dekade, Rusia telah menjadi pemasok utama gas alam bagi Eropa yang memenuhi hampir setengah dari total kebutuhan energi gas benua Eropa sejak tahun 2019. Namun, pemutusan pasokan gas oleh Rusia setelah invasi menyebabkan guncangan besar terhadap stabilitas energi, mengungkap ketergantungan struktural yang terbentuk akibat investasi besar (*Sunk Costs*), kekuatan perusahaan energi besar (*Incumbency*).¹

Cara pandang kebijakan yang selama ini mendukung gas dan fosil sebagai “bahan bakar transisi”. Uni Eropa merespon krisis tersebut dengan mempercepat kebijakan transisi energi yang menekankan diversifikasi sumber energi dan percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Kebijakan *REPowerEU* dan *European Green Deal* menjadi upaya kolektif untuk mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil Rusia dan kemandirian energi kawasan. Namun, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Menurut de Groot, peningkatan penetrasi energi terbarukan yang bersifat *variable*, seperti tenaga angin dan surya dapat menurunkan efisiensi serta jam operasi

¹ Hal R. Arkes and Catherine Blumer, “*The Psychology of Sunk Cost*,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 35, no. 1 (1985): 124-140, Accessed August 9, 2025. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(85\)90049-4](https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90049-4)

pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan berdalarn system energi.²

Ketergantungan tinggi menimbulkan kerentanan strategis yang sangat besar, terutama setelah Rusia menggunakan energi sebagai alat politik dengan memutuskan pasokan gas ke Eropa. Dampak dari kebijakan Rusia tersebut, Uni Eropa meluncurkan kebijakan transisi energi yang bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia.

Negara-negara di Eropa Utara seperti Islandia, Finlandia, dan Swedia memiliki Tingkat konsumsi energi perkapita yang sangat tinggi dikarenakan iklim yang dingin dan sangat bergantung pada pemanas rumah tangga, sebaliknya, negara-negara Eropa Selatan dan Timur seperti Bulgaria, Rumania, dan Ukraina memperlihatkan konsumsi energi yang jauh lebih rendah, mencerminkan tingkat industrialisasi yang berbeda dan daya beli masyarakat yang cenderung pasif.³ Ketimpangan ini mencerminkan relevansi langsung terhadap kebijakan energi Uni Eropa, khususnya dalam konteks transisi energi. Perbedaan konsumsi energi memperlihatkan ketidakseimbangan kapasitas energi terbarukan dan infrastruktur antarnegara anggota, hal ini yang menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan energi yang seragam di seluruh kawasan.

Kebijakan energi pasca pemutusan gas Rusia tidak hanya menjadi isu ekonomi dan lingkungan, tetapi juga politik, ekonomi dan keamanan jangka panjang Uni

² Adnan Vatansever and Andreas C. Goldthau, "The Political Economy of Breaking European Dependence on Russian Gas," *Resources Policy* 109 (2025): 105696, Accessed August 9, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105696>

³ European Commission. *Energy Statistics – an Overview: Energy Consumption per Capita, 2023*. Eurostat, 2023. Accessed August 10, 2025. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Primary_energy_production

Eropa. Langkah yang diambil Uni Eropa juga sejalan dengan komitmen jangka panjang Uni Eropa terhadap *European Green Deal* yang menargetkan netralitas karbon pada tahun 2050⁴. Rencana *European Green Deal* dan *REPower Plan* menunjukkan ambisi yang tinggi dan implementasinya menghadapi hambatan struktural. Perbedaan kapasitas ekonomi antarnegara anggota Uni Eropa menyebabkan kesenjangan dalam transisi energi, negara yang memiliki infrastruktur energi fosil yang kuat dinilai lebih siap dalam menghadapi biaya transisi lebih tinggi dibandingkan negara yang lebih maju dalam penggunaan energi terbarukan.⁵ Secara faktual, ketergantungan Uni Eropa terhadap gas alam Rusia sebelum tahun 2022 mencapai lebih dari 40% dari total impor gas kawasan. Ketergantungan ini memperlihatkan rentannya struktur dinamika geopolitik, terutama setelah pemutusan pasokan gas alam oleh Rusia yang mengakibatkan krisis energi serius, terganggunya stabilitas ekonomi dan stagnansi di area industri Uni Eropa, sehingga beberapa negara kembali menggunakan batu bara untuk menjaga pasokan listrik.⁶ Dilansir dari *International Energy Agency (IEA)* bahwa krisis yang dipicu perang Rusia dan Ukraina merupakan krisis energi global pertama yang dampak akan terasa selama bertahun-tahun ke depan.⁷ Menurut World Bank (2022), harga energi di Eropa

⁴ Eckersley, Robyn. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.

⁵ International Energy Agency. (n.d.). Energy security – Europe energy crisis reports. IEA. <https://www.iea.org/topics/energy-security>

⁶ Dahal, Usha, Kati Orru, Hans Orru, and Martin Dijst. “Green Dreams, Local Realities: Complexities of the European Union’s Energy Transition to Ensure Local Health.” *Energy Policy* (2023).

⁷ Arinaldo, Adma, and Margaretha Hanita. “Geopolitics Tension, Wars and Its Impact on Energy/Oil Crisis: Russia–Ukraine War Case Study.” *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity* 4, no. 5 (May 2025): 187–205.

melonjak hingga 400% antara April 2020 hingga Maret 2022⁸, sebagai respon, Rusia memutus pasokan gas alam ke negara-negara Eropa yang sela mini menjadi pelanggan utama, seperti Jerman, Italia, dan Polandia. Pemutusan ini berdampak langsung terhadap ketahanan energi Uni Eropa, memicu lonjakan harga listrik, serta menekan sektor industri yang sangat bergantung pada energi fosil. Krisis ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya dari satu sumber geopolitik, merupakan kerentanan struktural dalam sistem energi Uni Eropa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kemandirian energi dengan realitas ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.⁹

Transisi ke energi terbarukan dan kebijakan efisiensi energi menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan tersebut secara berkelanjutan.¹⁰ Sebagian bear studi menilai transisi energi dari perpektif teknokratik, krisis energi pasca pemutusan gas Rusia memperlihatkan dilema mendasar antara keamanan energi jangka pendek dan komitmen lingkungan jangka panjang.¹¹ Lonjakan tajam pada hharga gas dan inflasi di kawsan Uni Eropa antara 2021 hingga 2023, harga gas alam yang relative stabil pada kisaran €46 per MWh (*Megawatt Hour*) pada tahun 2021. Namun, setelah pemutusan pasokan gas oleh Rusia pada pertengahan 2022, harga melonjak drastic hingga mencapai 339 per MWh (*Megawatt Hour*), pada tahun 2023 setelah

⁸ World Bank. *Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*. Washington, DC: The World Bank, 2022.

⁹ Rafael Leal-Arcas and Jan Wouters, "Russia's War on Ukraine and the European Energy Crisis: A Pathway to a Sustainable Energy Transition?" *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 184 (2023): 113512, Accessed October 11, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113512>

¹⁰ European Commission. (2019). *The European Green Deal*. EUR-Lex. Accessed October 20, 2025. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640>

¹¹ Julio Noguera-Santaella, "Geopolitics and the Oil Price," *Economic Modelling* 52 (2016): 301–309, Accessed September 28, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.018>

implemtasi *REPowerEU Plan* dan diversifikasi pasokan energi, harga gas menurun hingga rata-rata €120 per MWh (*Megawatt Hour*) , kenaikan harga energi tersebut berdampak langsung terhadap inflasi di kawasan Eropa. Inflasi yang pada 2021 hanya 2,6%, meningkat menadi 9,8% pada akhir 2022.¹² Dinamika yang terjadi menunjukkan perubahan kebijakan energi Uni Eropa bukan hanya sekedar respon terhadap krisis, namun juga bentuk transformasi struktural dalam *Regional Governance*. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana organisasi regional menghadapi acaman eksternal yang mengancam stabilitas kawasann, selain itu, penelitian ini meneliti evolusi kebijakan energi dari pendekatan berbasis pasar menuju pendekatan yang lebih menekankan keamanan dan kedaulatan energi, terakhir, penelitian ini membantu memahami bagaimana Uni Eropa merespon krisis ini memberikan wawasan tentang kapasitas dan keterbatasan organisasi regional dalam mengelola krisis *multidimensional*. Tanpa respon cepat ini, Uni Eropa berpotensi mengalami stagnasi industri, krisis pasokan, dan ketergantungan geopolitik yang lebih dalam terhadap aktor eksternal. Dengan demikian, kebijakan transisi energi pasca 2022 bukan hanya reaksi terhadap krisis, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola regional (*regional governance*) Uni Eropa dalam menghadapi guncangan eksternal dan membangun kemandirian energi berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Krisis energi yang melanda kawasan Eropa pasca pemutusan pasokan gas oleh Rusia pada tahun 2022 menciptakan tekanan signifikan terhadap stabilitas energi,

¹² European Commission. *REPowerEU: Joint European Action for More Affordable, Secure and Sustainable Energy*. Brussels: European Commission, 2022.

ekonomi, dan geopolitik Uni Eropa. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil Rusia mengungkap adanya kelemahan struktural dalam sistem energi Uni Eropa, khususnya dalam aspek diversifikasi sumber energi, kemandirian pasokan, serta koordinasi kebijakan antarnegara anggota.

Sebagai respons, Uni Eropa menginisiasi berbagai kebijakan strategis, seperti *REPowerEU Plan* dan *European Green Deal*, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan energi regional, serta meningkatkan solidaritas antarnegara anggota. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun kelembagaan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut berlangsung, termasuk peran lembaga Uni Eropa dan aktor non-negara dalam membentuk tata kelola energi yang adaptif terhadap tekanan geopolitik global. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap mekanisme respons Uni Eropa dalam membangun ketahanan energi regional pasca krisis energi tahun 2022.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana langkah Uni Eropa dalam membangun kebijakan ketahanan energi regional pasca pemutusan pasokan gas oleh Rusia pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme respon kebijakan energi Uni Eropa pasca pemutusan gas Rusia, selain itu mengidentifikasi instrumen kebijakan yang digunakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis energi, terakhir,

membantu menjalaskan dinamikan koordinasi antarlembaga dan antarnegara anggota dalam implementasi kebijakan transisi energi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam aspek akademik, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap analisis kebijakan energi regional dengan menyoroti hubungan antara kebijakan lingkungan dan keamanan energi dengan mengkaji implementasi *REPowerEU Plan* dan *European Green Deal*, penelitian ini menyediakan bukti empiris mengenai efektivitas strategi transisi energi Uni Eropa dalam menanggapi krisis pasokan gas. Penelitian ini diharapkan memberikan dampak nyata tentang dinamika kebijakan energi yang kompleks, termasuk konflik kepentingan antarnegara anggota, ketegangan antara keberlanjutan dan stabilitas ekonomi dan tantangan infrastruktur dalam pengimplementasian energi hijau. Selanjutnya, Dalam sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi dan gambaran kebijakan di Uni Eropa dan negara-negara mitra internasional dalam merumuskan kebijakan energi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap krisis.

1.5 Studi Pustaka

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Usha Dahal, Kati Orru, Hans Orru dan Martin Dijst yang berjudul “*Green Dreams, Local Realities: Complexities of the European Union’s energy transition to ensure local health and well-being in a fossil fuel based industrial region*” dijabarkan bahwa transisi energi menuju system rendah karbon telah menjadi fokus utama dalam kebijakan global, khususnya dalam rancangan *European Green Deal* yang menetapkan target netralitas iklim pada tahun 2050, program *European Green Deal* dijelaskan tidak hanya bertujuan mengurangi

emisi, namun juga menekankan pentingnya aspek keadilan social melalui mekanisme *Just Transition Fund*. Pendekatan *Energy Transition* membantu menjelaskan bahwa keberhasilan transisi tidak cukup diukur dari penurunan emisi, melainkan dari kemampuan kebijakan tersebut untuk menjamin keadilan ekologis dan partisipasi demokratis. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah industry berbasis fosil menghadapi tantangan ketidakadilan lingkungan dan kesehatan.¹³

Artikel jurnal kedua diterbitkan oleh Simone Borghesi & Sergio Vergalli dalam artikel nya yang berjudul “*The European Green Deal, Energy Transition and Decarbonization*” menjelaskan *European Green Deal* sebagai salah satu kebijakan yang dirancang terkait transisi energi dan dekarbonisasi. Studi ini menekankan bagaimana *European Green Deal* dengan mekanisme kebijakan seperti carbon pricing, subsidi energi terbarukan dan program pendanaan hijau. Metodologi yang digunakan adalah analisis kebijakan normatif dan evaluatif yang menilai efektifita kebijakan Uni Eropa dengan membandingkan implementasinya di beberapa negara anggota. Poin yang disorot dalam artikel ini Adalah adanya ketidakmerataan kapasitas antarnegara, yang berimplikasi pada ketidaksetaraan dalam pencapaian target dekarbonisasi.¹⁴

Ruben Vezzoni dalam artikelnya yang berjudul “*Green growth for whom, how and why? The REPowerEU Plan and the inconsistencies of European Union energy policy*” yang mengkaji *REPowerEU Plan* yang diluncurkan setelah krisis energi

¹³ Dahal, U., Orru, K., Orru, H., & Dijkstra, M. (2024). Green dreams, local realities: Complexities of the European Union's energy transition to ensure local health and well-being in a fossil fuel-based industrial region. *Environmental Impact Assessment Review*, 106, 107520.

¹⁴ Borghesi, S., Vergalli, S. *The European Green Deal, Energy Transition and Decarbonization*. *Environ Resource Econ* 83, 1–3 (2022). Accessed October 19, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10640-022-00726-6>

tahun 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina. Artikel ini meneliti bagaimana rencana tersebut mendorong ekspansi energi terbarukan, terutama energi surya sebagai bagian dari strategi jangka panjang Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Temuan utama menunjukkan *REPowerEU Plan* mendukung percepatan energi terbarukan, implementasinya menimbulkan pertanyaan tentang keadilan transisi energi. Terjadinya kesenjangan antara negara-negara dengan kapasitas finansial dan teknologi yang tinggi dibandingkan dengan sumber daya yang terbatas. Akibatnya,¹⁵

REPowerEU berpotensi memperdalam ketidaksetaraan struktural di dalam Uni Eropa, meskipun kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi secara keseluruhan. Upaya kebijakan *REPowerEU* memberikan contoh nyata bagaimana krisis energi memaksa Uni Eropa untuk mengambil langkah cepat, namun dengan risiko menciptakan ketidakadilan antarnegara anggota. Dalam kerangka Green Theory memperkuat argument bahwa transisi energi seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan ekonomis, namun juga dari sisi keadilan ekologis dan distribusi manfaat yang lebih adil dan merata. Rencana *REPowerEU* dengan mengemukakan pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap *Green Development* yang sungguh – sungguh memprioritaskan keberlanjutan daripada berfokus pada ekspansi ekonomi. Selanjutnya, Ileana Zeler, Joan Ramon Rodriguez Amat dan Riasat Muhammad Amir dalam artikel jurnal mereka yang berjudul “*A Computational analysis of the media coverage of the European Parliament’s ‘green’*”

¹⁵ Vezzoni, R. (2023). Green growth for whom, how and why? The REPowerEU Plan and the inconsistencies of European Union energy policy. *Energy Research & Social Science*, 101, 103134. Accessed December 1, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103134>

Designation on sustainable energy and climate” artikel ini membahas tentang keberlanjutan terkait proses kebijakan energi Uni Eropa dan juga keberlanjutan pada Masyarakat. Jurnal ini menganalisis bagaimana pemberitaan media tentang energi nuklir, kebijakan iklim dan keberlautan berubah setelah disahhkan *European Climate Delegate Act* pada juli 2022. Pentingnya energi dalam agenda pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama berbagai studi di bidang energi dan komunikasi media. Banyak peneliti menyoroti bagaimana media memainkan peran dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu energi, keberlanjutan dan perubahan iklim. Artikel ini juga menyorot dampak pada kesehatan yang ditimbulkan dari Tragedi Chernobyl dan menjadikan tragedi tersebut sebagai langkah awal Uni Eropa dalam merencanakan kebijakan keberlangsungan energi.¹⁶

Artikel jurnal terakhir yang berjudul “*The EU’s New Energy and Climate Policy: Energy Security and the Moderation of Environmental Standards*” yang ditulis oleh Alberto Olivares, artikel ini menyoroti transformasi kebijakan iklim Uni Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina, peristiwa penting ini memaka Uni Eropa untuk menyeimbangkan kembali antara keamanan energi dan tujuan netralitas iklim, kebijakan energi Uni Eropa berkembang melalui tiga fase yaitu pertama, orientasi pada keamanna energi pasca krisis minyak pada 1970-an, kedua, liberalisasi pasar energi pada 1990-2000-an dan terakhir, integrasi kebijakan iklim melalui *Clean Energy Package* serta *European Green Deal*. Krisis energi dipicu oleh

¹⁶ Zeler, Ileana, Joan Ramon Rodriguez-Amat, and Riasat Muhammad Amir. “A Computational Analysis of the Media Coverage of the European Parliament's ‘Green’ Designation on Sustainable Energy and Climate Change.” *Energy Policy* 202 (2025): 114592. Accessed November 20, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114592>

ketergantungan pada gas Rusia mendorong lahirnya fase keempat, yaitu kebijakan energi dan iklim yang dibentuk oleh kepentingan keamanan energi. Dalam analisisnya, Olivares menyimpulkan bahwa kebijakan energi Uni Eropa saat ini sedang bergeser dari model yang menyeimbangkan *Sustainability – Climate – Energy Security* menuju model yang baru yang sangat dipengaruhi oleh dimensi keamanan energi, dengan perlindungan lingkungan berpotensi menjadi prioritas sekunder. Kontribusi utama artikel ini adalah menunjukkan adanya ketegangan antara transisi energi cepat dan perlindungan lingkungan, Di satu sisi, energi terbarukan dipandang sebagai Solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fosil yang semakin lama semakin menipis, di sisi lain, percepatan Pembangunan proyek energi terbarukan menimbulkan risiko terhadap keanekaragaman hayati dan hukum lingkungan Uni Eropa.¹⁷

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Regional Environmental Governance

Regional Environmental Governance merupakan konsep tentang tata kelola lingkungan dan isu-isu regional. Munculnya konsep ini didasarkan kepada bahwa suatu isu dapat terselesaikan dengan baik secara regional dibandingkan dengan konsep global. Konsep ini dilatarbelakangi oleh karakteristik yang muncul dari suatu regional seperti tingkat homogenitas suatu regional dan adanya permasalahan yang dihadapi oleh suatu regional.¹⁸ Dinamika hubungan antara berbagai level lembaga dalam suatu wilayah selanjutnya berujung pada pengembangan norma, kebijakan

¹⁷ Olivares, A. (2023). The EU's new energy and climate policy: Energy security and the moderation of environmental standards. *Global Energy Law and Sustainability*, 4(1–2), 1–21. Accessed October 8, 2025. <https://doi.org/10.3366/gels.2023.0091>

¹⁸ Monica Hertz, "Regional Governance," 2013, 241.

publik, dan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah serta pihak-pihak lain dalam kawasan sebagai usaha untuk meraih kepentingan bersama.¹⁹

Menurut Peter M. Haas dalam artikelnya yang berjudul tata kelola lingkungan regional, pengelolaan lingkungan di tingkat regional mencakup proses pengambilan keputusan secara bersama mengenai norma, lembaga, keterlibatan, praktik, dan peraturan yang berlangsung dalam cakupan regional suatu area. Agar tercapai kesepakatan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam pengelolaan regional, sangat penting bagi setiap pihak untuk memahami norma yang sudah ada.²⁰ Bentuk REG umumnya berwujud lembaga serta perjanjian resmi yang diatur dalam kerangka fungsional. Lembaga dan perjanjian ini akan menjadi patokan batasan perilaku dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan.²¹ Menurut Haas, lembaga dalam Tata Kelola Regional seharusnya mampu mengatasi isu-isu regional dengan tiga pendekatan:

1. Organisasi-organisasi regional yang telah ada dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah-masalah baru yang teridentifikasi, karena mereka memiliki sumber daya dan otoritas yang relevan.
2. Perlu ada pengembangan kelembagaan untuk mengatasi masalah yang ada. Organisasi regional memerlukan usaha yang lebih besar untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi perhatian negara, agar negara tidak perlu mencari bantuan dari organisasi global.

¹⁹ Monica Hertz, "Regional Governance," 236

²⁰ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.," *The Oxford Handbook of Comparative Regionalism 1* (2016): 619.

²¹ Peter M. Haas, 620.

3. Terakhir yaitu, bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang dapat membantu mengatasi permasalahan regional.²²

Untuk memahami langkah-langkah yang diambil Uni Eropa dalam mendorong implementasi *REPowerEU* dan *European Green Deal* dalam kebijakan nasional negara-negara anggotanya, peneliti menggunakan empat kriteria. Kriteria ini bertujuan mengevaluasi peran Uni Eropa sebagai lembaga pembuat regulasi. Kriteria tersebut menguraikan mekanisme penerapan regulasi di tiap negara anggota, serta kontribusi Uni Eropa dalam memotivasi integrasi kebijakan ini ke dalam kebijakan domestik masing-masing negara, yaitu:

1. Norma

Sebuah norma dimulai dari sebuah gagasan, yang kemudian berkembang menjadi kepercayaan bersama mengenai perilaku yang dianggap layak atau tidak. Norma dapat bersifat lokal, regional, maupun internasional. Dalam lingkup lokal, norma bisa terwujud dalam bentuk undang-undang atau kebijakan. Sementara itu, pada tingkat global, norma dapat terlihat sebagai harapan tidak tertulis tentang perilaku negara, perjanjian internasional, standar yang sudah ditetapkan, maupun kode etik.²³ Konsep yang berkaitan dengan norma lingkungan sudah ada sejak tahun 1960-an, yang mencakup keyakinan akan pentingnya perlindungan hutan, pengendalian polusi bahan kimia, penanganan perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem untuk generasi mendatang. Norma lingkungan mencakup aturan yang membatasi segala tindakan yang dapat merusak lingkungan serta mengatur perilaku

²² Peter M. Haas, 620.

²³ Ernst Mohr, "Environmental Norms, Society, and Economics," 1994, 229.

yang mendukung kelestarian lingkungan. Negara dan organisasi internasional harus mempertimbangkan dampak lingkungan saat merumuskan kebijakan yang relevan.²⁴

2. Institusi

Institusi global adalah sekumpulan prinsip, norma, dan regulasi untuk mengatur interaksi antara negara dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah secara kolektif. Dalam kajian ini, Uni Eropa berfungsi sebagai lembaga yang menaungi REPowerEU dan *European Green Deal* yang menjelaskan norma, prinsip, dan regulasi yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggota Uni Eropa, dengan penekanan pada isu lingkungan, khususnya dalam konteks kemandirian energi.²⁵ Bagian ini menjelaskan peran Uni Eropa sebagai lembaga yang melampaui batas negara dan sebagai aktor utama di wilayah tersebut.

3. Partisipasi

Salah satu pelaku utama dalam keterlibatan pengelolaan lingkungan adalah para pembuat kebijakan yang memiliki otoritas dalam menentukan keputusan. Pada bagian ini, peneliti akan mengevaluasi peran Uni Eropa sebagai pihak berkepentingan dan penyusun peraturan dalam pengelolaan lingkungan di Eropa, serta dukungannya terhadap implementasi REPowerEU dan *European Green Deal* ke dalam kebijakan nasional tiap negara anggota, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan situasi domestik yang ada pada masing-masing anggota.²⁶

²⁴ Justin Alger and Peter Dauvergne, "The Translocal Politics of Environmental Norm Diffusion," *Environmental Communication* 14, no. 2 (February 17, 2020): 156

²⁵ Andaru Satnyoto, "Perspektif Teori Institusionalisme Dan Teori Kritis Terhadap Rezim Internasional Lingkungan," n.d., 98

²⁶ Gavin Bridge and Tom Perrault, "Environmental Governance," *A Companion to Environmental Geography*, 2009, 475–497.

4. Aturan dan Praktik

Organisasi regional mendukung kebijakan umum tentang lingkungan dengan memberikan panduan dan peraturan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan tersebut. Sangat penting untuk menilai bagaimana Uni Eropa sebagai badan pembentuk peraturan bertekad untuk mendorong penerapan praktik berdasarkan regulasi yang sudah disetujui di negara-negara anggota Uni Eropa demi tercapainya kemandirian energi di wilayah tersebut.²⁷

Para ahli meyakini bahwa ide REG amatlah pas untuk digunakan dalam riset ini. Hal ini karena ide tersebut dapat melukiskan bagaimana Uni Eropa berperan dalam REG di benua Eropa. Selain itu, ide ini menolong menjelaskan kesungguhan dan upaya Uni Eropa selaku pembuat aturan dalam menyokong penerapan regulasi di tiap negara anggotanya.

1.7 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berfokus pada pengeksplorasi dan memahami fenomena sosial atau kebijakan yang kompleks melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, dokumen, dan wacana.²⁸ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan kebijakan energi Uni Eropa dalam konteks geopolitik dan

²⁷ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.," 622.

²⁸ Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

regionalisme, serta memahami dinamika yang terjadi akibat dari tekanan eksternal seperti perang Rusia dan Ukraina.²⁹

1.7.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi analisis kebijakan transisi energi Uni Eropa yang muncul akibat pemutusan pasokan gas alam oleh Rusia sebagai respon terhadap sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa. Ruang lingkup temporal penelitian mencakup periode 2022–2025, yaitu fase krisis energi paling signifikan sekaligus periode akselerasi kebijakan transisi energi di tingkat Uni Eropa. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis yang dihadapi melalui kebijakan *REPowerEU* dan *European Green Deal* sebagai instrument utama Uni Eropa dalam mempercepat transformasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia, serta dampak yang ditimbulkan dari pemutusan pasokan gas Rusia dalam aspek geopolitik dan ekonomi, penelitian ini meninjau aspek kebijakan public dan hubungan internasional dalam konteks regionalism dan tata kelola global.

1.7.3 Unit dan Tingkat Analisis

Pada penelitian ini, unit analisis penelitian Adalah transisi energi Uni Eropa sebagai respon terhadap krisis pasokan gas Rusia. Secara spesifik, unit analisis mencakup dokumen kebijakan *REPowerEU Plan* dan *European Green Deal*, serta mekanismenya di tingkat regional.³⁰ Penelitian ini merujuk kebijakan energi regional Uni Eropa, khususnya respon terhadap krisis energi pasca pemutusan gas Rusia akibat pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Fokus utama unit analisis

²⁹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

³⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional* (Yogyakarta: LP3ES, 1990).

terletak pada kebijakan *REPowerEU* dan *European Green Deal* yang menjadi langkah strategis Uni Eropa dalam memperkuat ketahanan energi. Dalam konteks penelitian, krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina berfungsi sebagai *external shock* yang memaksa Uni Eropa melakukan perubahan kebijakan dari ketergantungan terhadap energi fosil impor menuju kebijakan transisi energi berkelanjutan.³¹ Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dan mengapa Uni Eropa mempercepat transisi energi, diversifikasi sumber pasokan dan penguatan ketahanan energi regional.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data berperan dalam memahami bagaimana kebijakan regional dirumuskan, dijalankan, dan direspon oleh aktor-aktor internasional, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi studi dokumen, analisis data, artikel jurnal, *e-book*, dan sumber berita yang valid dari internet. Penelitian ini diperkuat dengan analisis data sekunder seperti *Eurostat*, *International Energy Agency*, *European Commission*, *World Bank*, *European Investment Bank* menjadi sumber utama dalam memahami arah dan dinamika kebijakan transisi energi pasca krisis gas Rusia. Sumber data yang telah dikumpulkan akan diverifikasi melalui teknik triangulasi data yang menekankan pentingnya menggabungkan berbagai sumber dan metode penelitian untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

³¹ Hermann, Charles F. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *International Studies Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3–21.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini digunakan untuk menginterpretasi hubungan antara fenomena krisis energi Rusia dan perubahan kebijakan energi Uni Eropa secara sistematis.³² Langkah pertama adalah reduksi data atau menyederhanakan data secara ilmiah dan memfokuskan informasi dari berbagai sumber. di tahap ini peneliti menyeleksi bagian yang berkaitan dengan respon Uni Eropa terhadap krisis energi, strategi diversifikasi energi, serta upaya akselerasi energi terbarukan.³³ Pada tahap kedua, yaitu *data display* yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori seperti diversifikasi sumber energi, diplomasi energi, ketahanan energi, dan keberlanjutan lingkungan, melalui pola tersebut memudahkan peneliti dalam membaca pola kebijakan regional Uni Eropa. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah di jelaskan dan di analisis akan di sesuaikan dengan sumber untuk memastikan validitasnya, proses ini disertai triangulasi sumber kesimpulan penelitian tidak hanya menggambarkan aspek kebijakan formal, namun juga memaparkan dinamika politik dan ekonomi yang melatarbelakangi perubahan kebijakan tersebut.³⁴

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013).

³³ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.

³⁴ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.

1.8 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara kasar mengenai latar belakang yang akan diteliti, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian dan tinjauan pustakan yang menjadi bahan rujukan, menemukan data, dan pembandingan dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai acuan dalam penelitian.

BAB II: KONDISI GEOPOLITIK UNI EROPA PASCA PEMUTUSAN GAS RUSIA

Bab ini membahas tentang ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia sebelum krisis, serta dampak langsung pemutusan gas terhadap keamanan energi, ekonomi, dan stabilitas politik kawasan, serta faktor perubahan konstelasi geopolitik mendorong Uni Eropa mencari alternatif pasokan energi.

BAB III: KEBIJAKAN DAN PELUNCURAN *REPowerEU Plan* DAN *European Green Deal* UNTUK KEBERLANGSUNGAN ENERGI UNI EROPA

Pada bab ini membahas perubahan kebijakan energi Uni Eropa sebagai respon terhadap krisis energi, dengan fokus pada dua kebijakan utama yaitu *REPowerEU Plan* dan *European Green Deal*, pembahasan ini mencakup latar belakang, tujuan dan implementasinya dalam memperkuat ketahanan energi, serta kontribusinya terhadap transisi energi berkelanjutan di kawasan Uni Eropa.

BAB IV: PEMBANGUNAN ENERGI EROPA TERHADAP PEMUTUSAN KERJASAMA ENERGI RUSIA

Pada bab ini berisi analisis mengenai efektifitas dan perkembangan kebijakan Uni Eropa daam mewujudkan kemandirian energi, serta melihat bagaimana Uni Eropa sebagai entitas supranasional mengoordinasikan kebijakan antarnegara anggotanya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

